



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 868 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KEPADA PT. YASMIRA WISATA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran di lapangan, PT. Yasmira Wisata Utama telah:
1. meminjamkan legalitas perizinan kepada PT. Bahira sedangkan PT. Bahira tidak memiliki izin sebagai PPIU;
  2. tidak memulangkan jemaah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sesuai dengan jadwal; dan
  3. tidak memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata.
- sehingga melanggar ketentuan Pasal 94 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. Yasmira Wisata Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. YASMIRA WISATA UTAMA.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. YASMIRA WISATA UTAMA  
Nomor SK Izin : 376Tahun 2017  
DirekturUtama :DR. Anggita P. Siregar  
Alamat :Jl. Multatuli, Kel. Jati, Kec. Medan  
Maimun Kota Medan

KEDUA : PT. Yasmira Wisata Utama wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah yang telah mendaftar umroh atau melimpahkan keberangkatan Jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh PT. Yasmira Wisata Utama sesuai dengan jumlah biaya yang disetorkan jemaah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR